

# LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2021

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan “**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan IV Tahun 2021**” dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan telah menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel guna mendukung akuntabilitas Kementerian Perhubungan di bidang pengelolaan transportasi perkotaan, khususnya untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Laporan Monitoring Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan IV Tahun 2021 berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan transportasi perkotaan yang dilaksanakan selama Triwulan IV tahun 2021 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek selama kurun waktu Triwulan IV tahun 2021. Selain itu, Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada periode berikutnya.

Jakarta, Februari 2022

Plt.KEPALA  
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI  
JABODETABEK

Drs. BUDI SETIYADI, SH. M.Si.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. LATAR BELAKANG .....	1
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
3. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
4. PERJANJIAN KINERJA.....	10
5. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	14
<b>BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA</b> .....	<b>18</b>
A. CAPAIAN KINERJA .....	18
1. <b>Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek</b> .....	19
2. <b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek</b> .....	20
3. <b>On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek</b> .....	23
4. <b>Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan</b> .....	24
5. <b>Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek</b> .....	25
B. REALISASI ANGGARAN .....	28
1. <b>Alokasi Anggaran Tahun 2021</b> .....	28
2. <b>Realisasi Anggaran Tahun 2021</b> .....	29
3. <b>Efisiensi Anggaran Tahun 2021</b> .....	33
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>35</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	9
Gambar 1.2. Pemetaan Sasaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 2020 – 2024 Pada Konsep Renstra 2020-2024.....	11
Gambar 2.1. Kurva S Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan BPTJ Triwulan IV Tahun 2021 .....	30

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BPTJ Tahun 2021 .....	13
Tabel 1.2. Analisis Indikator Kinerja BPTJ .....	14
Tabel 1.3. Perbandingan Indikator Kinerja lama dan Indikator Kinerja Baru .....	17
Tabel 2.1. Capaian Kinerja BPTJ Triwulan IV Tahun 2021 .....	18
Tabel 2.2. Unsur Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat .....	21
Tabel 2.3. Penilaian Unsur Pelayanan.....	22
Tabel 2.4. On Time Performance Bus Perkotaan .....	23
Tabel 2.5. On Time Performance Kereta Api Perkotaan.....	23
Tabel 2.5. Kejadian Kecelakaan Tahun 2021 .....	25
Tabel 2.5. Lembar Kerja PMPRB.....	26
Tabel 2.6. Anggaran per Jenis Belanja Triwulan IV .....	28
Tabel 2.7. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKP Triwulan I s.d Triwulan III Tahun 2021 .....	31
Tabel 2.8. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKP Triwulan IV Tahun 2021 .....	32
Tabel 2.9. Efisiensi Anggaran Triwulan IV Tahun 2021 .....	34

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014, maka disusunlah Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tahun 2020. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja BPTJ selama Triwulan IV tahun 2021, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan diawal pembentukan BPTJ dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2021. Komitmen dimaksud merupakan fokus BPTJ dalam mencapai target kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama Triwulan IV tahun 2021 berdasarkan tujuan dan sasaran BPTJ yang telah ditetapkan.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Triwulan IV tahun 2021 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan oleh BPTJ dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis dilakukan pengukuran capaian kinerja. Capaian kinerja (*performance result*) Triwulan IV tahun 2021 dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) yang telah disesuaikan dengan DIPA TA 2021 berikut revisinya, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan BPTJ. Analisis atas capaian kinerja Triwulan IV tahun 2021 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Pasal 2 dan Pasal 3, meliputi:

### 2.1. Tugas

BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

### 2.2. Fungsi

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- c. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- d. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- e. Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- f. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- g. Penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

- h. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal;
- i. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- j. Pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*);
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum serta program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- l. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya; dan
- m. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) merupakan unit kerja penunjang Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas mengembangkan, mengelola dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik. Pelaksanaan tugas BPTJ dalam rangka memenuhi fungsinya untuk (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum, rencana program/kegiatan, dan kebutuhan anggaran antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; (2) Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan, pengembangan sarana dan prasarana penunjangnya, serta pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas; (3) Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam RITJ; (4) Penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan; (5) Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal; (6) Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi; (7) Pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*); (8) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum serta program pengembangan dan pelayanan transportasi; dan (9) Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran.

Pembentukan BPTJ merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telah ditetapkan pada tanggal 18 September 2015. Pembentukan organisasi ini selanjutnya diikuti dengan penetapan struktur organisasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, dimana BPTJ memiliki empat unit kerja eselon II yang terdiri dari Sekretariat Badan, Direktorat Prasarana, Direktorat Lalu Lintas, dan Direktorat Angkutan

Dengan ditetapkannya PM 110 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan



kepada BPTJ dalam mengelola penyelenggaraan transportasi Jabodetabek, maka perlu dilakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan lainnya terkait penyelenggaraan transportasi Jabodetabek, salah satunya dengan mencabut PM 66 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Perhubungan kepada Kepala BPTJ, sehingga kewenangan pengelolaan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mutlak ada di BPTJ. Hal ini didukung dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

Sebagaimana telah ditetapkan dalam *timeline*, pengimplementasian RITJ memerlukan waktu 12 (dua belas) tahun, dari 2018 hingga 2029. Pembangunan dalam waktu 12 tahun ini tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus paralel dan masif agar permasalahan transportasi dapat terselesaikan secara menyeluruh. Sehingga diperlukan adanya koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, hingga badan usaha selaku pengembang maupun operator. Selain itu, dalam perencanaan transportasi dibutuhkan juga sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang wilayah. Seiring dengan perkembangan waktu, perencanaan transportasi dan tata ruang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi.

Laporan Monitoring Kinerja BPTJ Triwulan IV Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BPTJ sangat didukung oleh kinerja unit kerja Eselon II di lingkungan BPTJ.

Pada tahun 2020, BPTJ melakukan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang memberikan arah kebijakan serta pedoman dalam memetakan prioritas-prioritas pembangunan untuk mencapai indikator kinerja utama BPTJ, yaitu mewujudkan transportasi terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Renstra BPTJ dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta pengukuran kinerja, kinerja anggaran, dan kinerja organisasi BPTJ.

BPTJ pada tahun 2021 memiliki enam Indikator Kinerja Program (IKP) yang berorientasi outcome dan merupakan core business yang menjadi dasar analisis capaian kinerja BPTJ Triwulan IV Tahun 2021. Hal ini merupakan tindak lanjut hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Area Akuntabilitas oleh Kemenpan RB yang mengamanatkan bahwa indikator kinerja harus berorientasi outcome dan merupakan core business dari BPTJ.

Selanjutnya, Laporan Monitoring Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Triwulan IV Tahun 2021 berisikan program dan kegiatan bidang pengelolaan transportasi perkotaan yang dilaksanakan selama Triwulan IV tahun 2021 sebagai bentuk implementasi konsep Rencana Strategis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target IKP yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai oleh BPTJ selama kurun waktu Triwulan IV tahun 2021. Selain

itu, Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada periode berikutnya.

### **3. STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, terdiri dari Sekretariat Badan, Direktorat Prasarana, Direktorat Lalu Lintas, dan Direktorat Angkutan.

#### **3.1. Sekretariat Badan**

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta evaluasi dan pelaporan;
  - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, penyusunan perjanjian dan kerjasama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
  - Penyiapan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum; dan
  - Penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasi dan dokumentasi, serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

#### **3.2. Direktorat Prasarana**

- a. Direktorat Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat, perkeretaapian, serta integrasi prasarana transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi prasarana transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

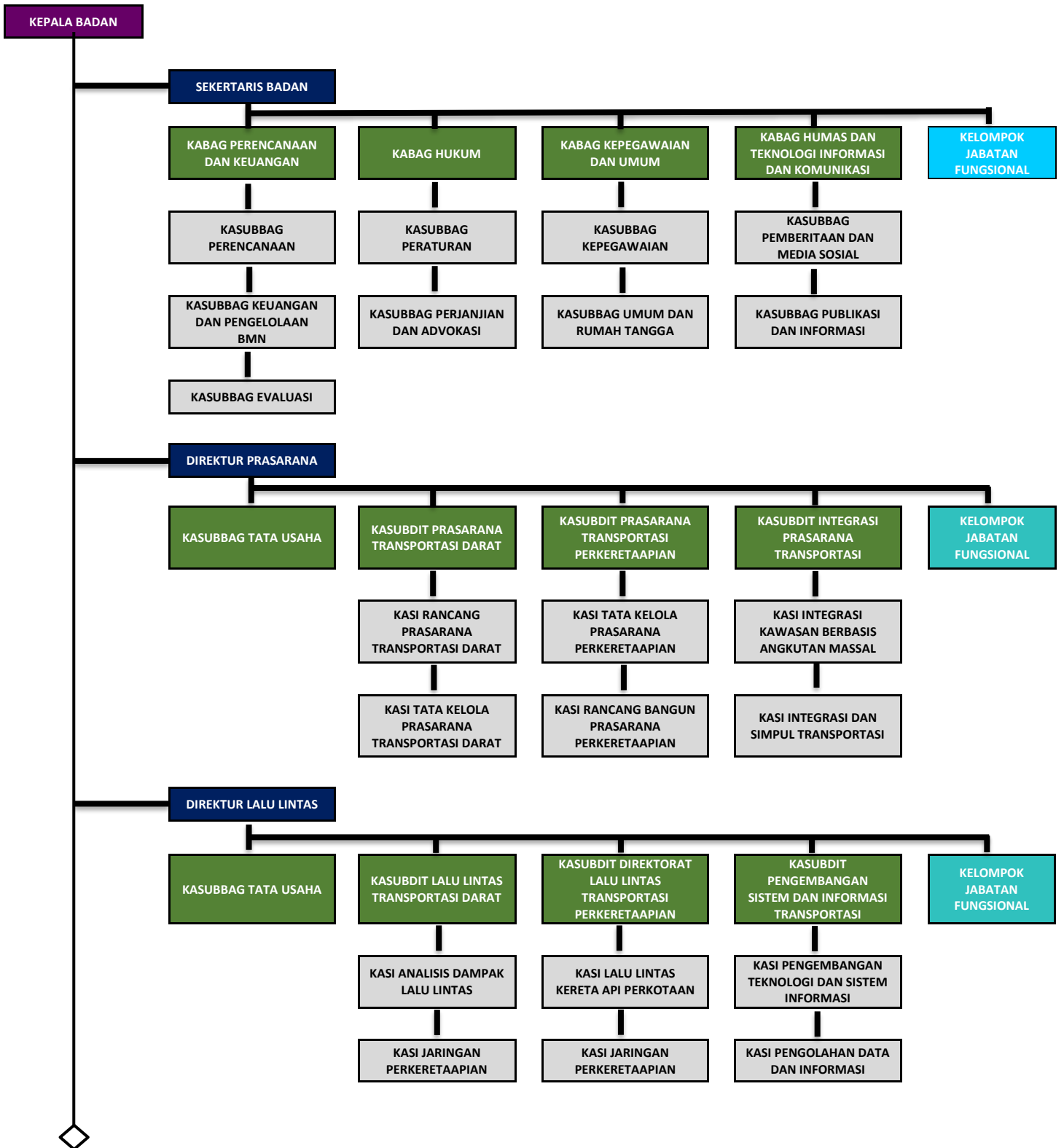
### **3.3. Direktorat Lalu Lintas**

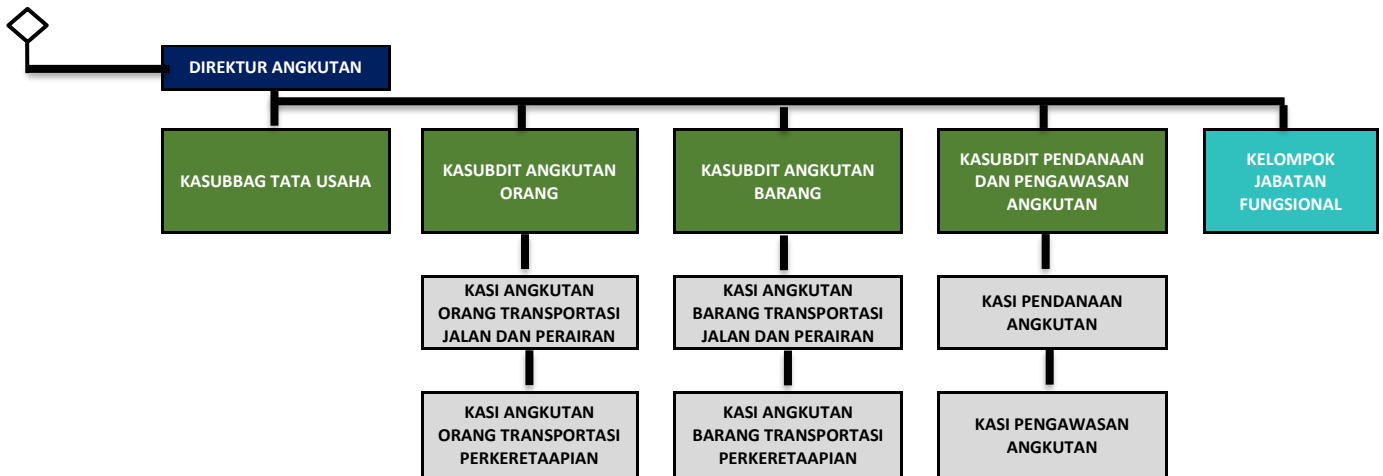
- a. Direktorat Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat, lalu lintas transportasi perkeretaapian, serta pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
  - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
  - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi perkeretaapian di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
  - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan

informasi transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

#### **3.4. Direktorat Angkutan**

- a. Direktorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, serta pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Angkutan menyelenggarakan fungsi:
  - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
  - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
  - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan dan pengawasan angkutan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.



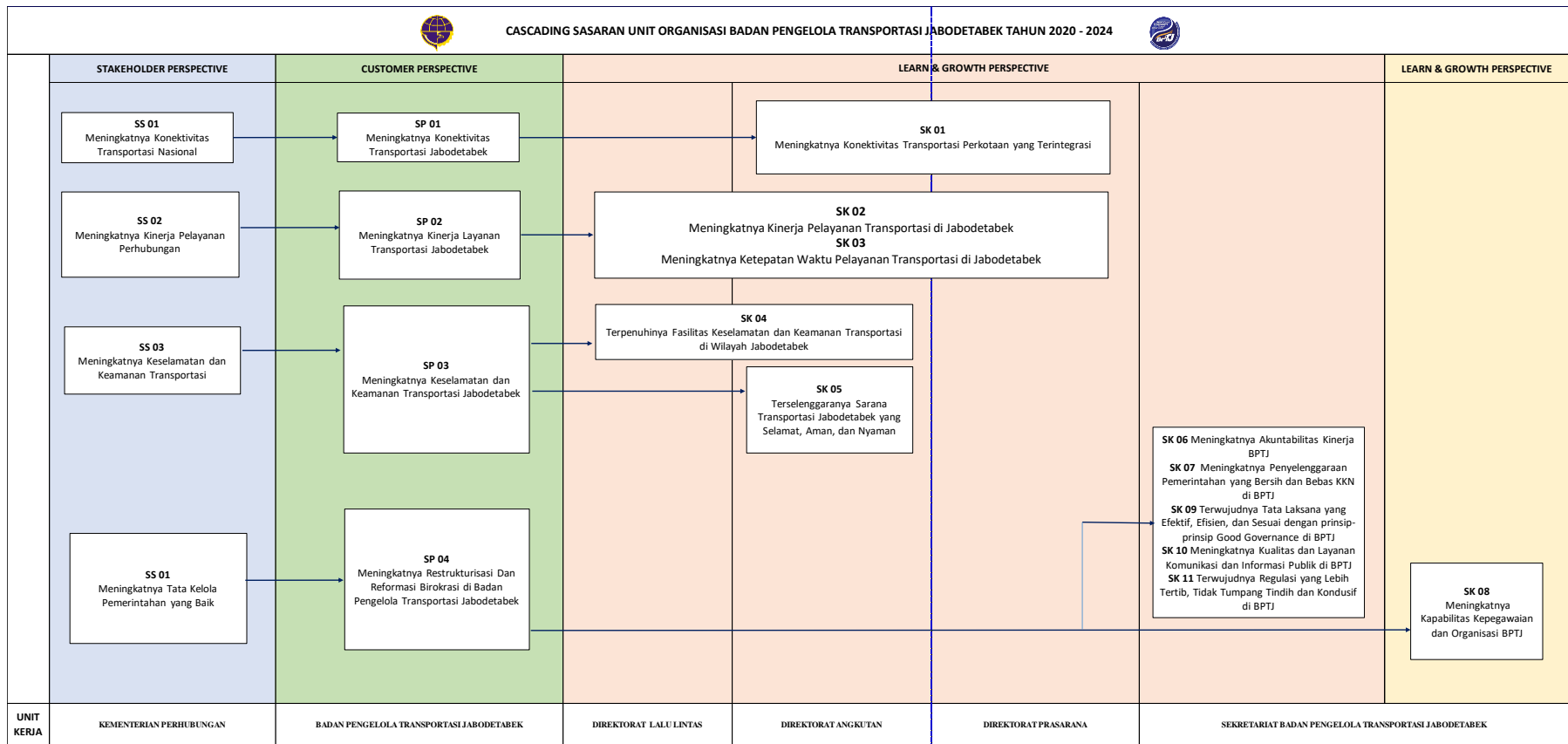


**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek**

#### **4. PERJANJIAN KINERJA**

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk tahun 2021 telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun secara berjenjang mengacu pada konsep Renstra BPTJ Tahun 2020-2024. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Pejabat Eselon IV dengan Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon II dengan Eselon I, serta Pejabat Eselon I dengan Menteri Perhubungan.

Sasaran program Badan BPTJ merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome dari beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan, serta capaian dan permasalahan yang dihadapi oleh BPTJ pada periode sebelumnya. Selanjutnya, dari lima Sasaran Program (SP) dijabarkan menjadi enam Indikator Kinerja Program (IKP). IKP BPTJ berdasarkan konsep Renstra Tahun 2020-2024 menjadi dasar analisa capaian kinerja Triwulan IV tahun 2021, sebagaimana disajikan dalam pemetaan sasaran BPTJ berikut ini:



**Gambar 1.2. Pemetaan Sasaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek 2020 – 2024 Pada Konsep Renstra 2020-2024**



Adapun penjabaran dari perspektif sasaran BPTJ dituangkan dalam indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

- a. Sasaran Program Pertama (SP1) yang akan dicapai adalah terwujudnya konektivitas transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program (IKP1) yaitu Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek.
- b. Sasaran Program Kedua (SP2) yang akan dicapai adalah terwujudnya kinerja layanan transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:
  - IKP 2.1: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi perkotaan Jabodetabek.
  - IKP 2.2: *On Time Performance* (OTP) layanan transportasi perkotaan Jabodetabek.
- c. Sasaran Program Ketiga (SP3) yang akan dicapai adalah terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program (IKP3) yaitu Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan.
- d. Sasaran Program Keempat (SP4) yang akan dicapai adalah terwujudnya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, dengan Indikator Kinerja Program (IKP4) yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Korelasi antara Sasaran Strategis Kementerian, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program serta satuan dan target diuraikan dalam tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program BPTJ Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
<b>SS1</b> Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	<b>SP1</b> Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	<b>IKP1</b> Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Rasio	0,3233
<b>SS2</b> Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	<b>SP2</b> Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	<b>IKP2.1</b> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Nilai	75
		<b>IKP2.2</b> OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	80,5
<b>SS3</b> Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	<b>SP3</b> Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	<b>IKP3</b> Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan	%	97
<b>SS4</b> Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<b>SP4</b> Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	<b>IKP4</b> Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ	Nilai	32,88

## 5. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan rapat evaluasi atas SAKIP yang dilakukan bersama Kemenpan RB dan Inspektorat Jenderal pada tahun 2021, didapati bahwa beberapa Indikator Kinerja Utama milik BPTJ dinilai belum optimal. IKU yang dinilai masih belum optimal adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2. Analisis Indikator Kinerja BPTJ**

Indikator Kinerja		Analisis
SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	Konektivitas berkaitan dengan terhubungnya satu titik dengan titik lainnya. Konektivitas dapat digambarkan dengan terhubungnya simpul-simpul transportasi, dari berapa persen yang belum terhubung menjadi terhubung dan simpul-simpul yang belum lengkap menjadi terhubung satu sama lain
		Konektivitas adalah menghubungkan antara 1 wilayah dengan wilayah lain, bukan berapa banyaknya pengguna angkutan umum dibanding pengguna angkutan pribadi
IKP1	Meningkatnya Modal Share Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	IKP modal share dianggap tidak cukup dan tidak relevan dengan unsur SP Konektivitas, melainkan lebih relevan dengan okupansi atau pemanfaatan moda penumpang umum
		Modal share dianggap tidak relevan dan tidak cukup mencerminkan sasaran konektivitas. Bagaimana jika kenaikan penumpang angkutan umum hanya terdapat di simpul tertentu saja namun di lokasi lain tidak mengalami kenaikan. Dalam hal ini rasio modal share akan tetap naik sehingga tidak mencerminkan konektivitas secara langsung
		Modal share bisa saja dikaitkan dengan konektivitas, tapi ada hal lain yang lebih tepat dan langsung mengarah ke konektivitas. Jika indikatornya adalah modal share, maka hal tersebut mencerminkan tingkat utilitas penggunaan angkutan umum, bukan konektivitas. Jika indikatornya adalah modal share, maka hal tersebut mencerminkan tingkat utilitas penggunaan angkutan umum, bukan konektivitas
		Modal share kurang mencerminkan konektivitas karena hanya dihitung dengan rasio pengguna penumpang umum yang transit. Seharusnya konektivitas lebih tepat diukur dengan berapa persen wilayah satu dengan wilayah lain sudah terhubung
		Tidak masalah jika modal share angkutan umum diambil dari responden survey, namun pengungkapannya pada laporan juga harus disebutkan modal share berdasarkan responden
		modal share tidak relevan dengan konektivitas. Dalam hal ini yang dimaksud relevan adalah "yang terkait langsung." Jika hanya dilihat dari bisa dikaitkan atau tidak, maka semuanya dapat dikaitkan. Sehubungan dengan hal tersebut, modal share sebaiknya dimasukkan ke dalam OP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek.

Indikator Kinerja		Analisis
SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	Sasaran Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek sudah disetujui dan tidak ditemukan permasalahan
IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Data untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat diharapkan merupakan data dari BPTJ sendiri, jangan sampai rancu dengan unit kerja eselon I lainnya
IKP2.2	On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Terkait dengan IOP2.2, dapat disusun pohon kinerja yang berisi apa saja yang perlu dilakukan oleh masing-masing direktorat untuk mencapai OTP ( <i>On Time Performance</i> )
IKP3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Trip	Indikator keselamatan dianggap kurang etis jika dirumuskan dengan sesuatu yang negatif seperti tercapainya rasio kecelakaan. Karena meskipun tercapai rasio kecelakaan yang rendah namun jika kecelakaan yang terjadi tingkat <b>fatalitasnya tinggi</b> maka tetap saja tujuan keselamatan dan keamanan masih belum tercapai.
		Indikator rasio kecelakaan tidak dapat dihilangkan karena diturunkan dari RPJMN. Maka dari itu perlu dirumuskan ulang dengan menggunakan <i>positive statement</i>
		IKU Es I merupakan turunan dari IKU kementerian, ada 3: (1) Konektivitas, (2) Layanan, dan (3) Keselamatan. Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan per 10.000 trip ini merupakan turunan dari RPJMN Kementerian Perhubungan
IKP4	Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	IKP4 Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek masih bersifat output
SP5	Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Indikator utama dalam OP (Output Program) 5 dianggap kurang, sehingga perlu ditambah dengan indikator lain yang menunjang sasaran terkait, seperti IKK 19 Indeks Maturitas SPIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan PMPRB
IKP5	Nilai AKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	IKP5 Nilai AKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dinilai tidak cukup dan tidak relevan dengan SP5 Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Atas hal tersebut telah dilaksanakan rapat internal BPTJ, yg dihadiri oleh perwakilan Pejabat Eselon 2, 3, 4 dan pegawai dari Direktorat Angkutan, Direktorat Prasarana, Direktorat Lalu Lintas, dan Sekretariat BPTJ yang menyepakati untuk melakukan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP), Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BPTJ beserta Renstra dan dokumen turunan lainnya. Adapun IKP yang disesuaikan yaitu IKP1 Modal Share, IKP4 Kegiatan Penunjang Teknis, dan IKP5 Nilai AKIP. Selanjutnya untuk

Sasaran Kegiatan terdapat penyesuaian terhadap SK5, SK6, SK7, dan SK8 dan untuk Indikator Kinerja Kegiatan akan dilakukan penyesuaian terhadap IKK6, IKK7, IKK13, dan IKK15.

Hasil diskusi dan masukan dari rapat internal BPTJ tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan draft revisi Renstra BPTJ Tahun 2020-2024 beserta PK dan RKT. Telah dilaksanakan juga rapat Finalisasi IKU BPTJ dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi, dimana IKU BPTJ tahun 2021 harus bersifat outcome dari perspektif customer/stakeholder yang merepresentasikan kinerja BPTJ.

Reviu Finalisasi IKU BPTJ tahun 2021 menghasilkan perubahan baik itu di level Sasaran Program (SP), Sasaran Kegiatan (SK), Indikator Kinerja Program (IKP), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), penyesuaian rumusan perhitungan IKP dan IKK serta targetnya. Terkait hal ini, diperlukan penetapan atas perubahan IKU BPTJ sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Nomor KP-BPTJ 113 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2021. Untuk itu, telah disampaikan konsep perubahan SK Penetapan IKU BPTJ untuk dapat diproses lanjut

Berikut hasil perbaikan dan finalisasi IKU BPTJ untuk tingkat Eselon I:

Indikator Lama		Indikator Baru
SP1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek
IKP1	Meningkatnya Modal Share Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek
SP2	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek
IKP2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek
IKP2.2	On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek
SP3	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek
IKP3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Tip	Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan
SP4	Terwujudnya Pemenuhan Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	Terwujudnya Pemenuhan Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek
IKP4	Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek
SP5	Terwujudnya Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Terwujudnya Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
IKP5	Nilai AKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ

**Tabel 1.3. Perbandingan Indikator Kinerja lama dan Indikator Kinerja Baru**

## BAB II DATA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran program BPTJ. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran program yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja BPTJ Tahun 2021 dapat tercapai.

Berdasarkan penetapan target pada setiap Indikator Kinerja Program (IKP) BPTJ, berikut adalah pencapaian Sasaran Program (SP) BPTJ pada Triwulan IV tahun 2021:

**Tabel 2.1. Capaian Kinerja BPTJ Triwulan IV Tahun 2021**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target PK 2021	Target TW IV	Capaian TW IV	% Capaian
SP1 Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek	IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	Nilai	0,3233	0,3233	0,3698	114,37%
SP2 Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek	IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	Nilai	75	75	76,73	102,3%
	IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	%	80,5	80,5	72,3	89,81%
SP3 Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek	IKP3 Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam	%	97	97	98,57	101,62%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target PK 2021	Target TW IV	Capaian TW IV	% Capaian
	10.000 Keberangkatan					
<b>SP4</b> Terwujudnya Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	<b>IKP4</b> Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ	Nilai	32,88	32,88	32,88	100%

### 1. Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek

Konektivitas transportasi perkotaan di Jabodetabek diwujudkan dengan terhubungnya satu titik simpul dengan titik simpul lainnya menggunakan moda angkutan umum dengan didukung oleh pengembangan trayek angkutan umum berbasis jalan dan kereta api perkotaan serta mengintegrasikan angkutan antar moda di wilayah Jabodetabek.

Terwujudnya Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diukur melalui IKP ini dengan rumus berikut:

$$IKP1 = (30\% \times \frac{IKK1}{100}) + (30\% \times IKK2) + (40\% \times \frac{IKK3}{100})$$

IKK1 adalah persentase konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis jalan

$$IKK1 = \frac{\text{Panjang Trayek AU Perkotaan}}{\text{Panjang Jalan di Jabodetabek}}$$

IKK2 adalah persentase konektivitas angkutan umum perkotaan berbasis rel

$$IKK2 = \frac{\text{Panjang Jalan Rel KA Perkotaan}}{\text{Luas Wilayah Jabodetabek}}$$

IKK3 adalah persentase simpul transportasi utama yang terintegrasi

$$IKK3 = \frac{\sum \text{Simpul Utama dengan Akses ke dan dari Simpul Pengumpan}}{\sum \text{Total Simpul Utama di Jabodetabek}}$$

Dari rumus di atas dapat diketahui bahwa IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek ditunjang oleh tiga IKK lain. Data capaian IKK penunjang IKP1 adalah sebagai berikut:

- Nilai IKK1 sebesar 73,5 (capaian 108,12%)



- Nilai IKK2 sebesar 0,0375 (capaian 100%)
- Nilai IKK3 sebesar 34,5 (capaian 127,78%)

Dengan data tersebut, diperoleh penghitungan IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek:

$$IKP1 = (30\% \times \frac{73,5}{100}) + (30\% \times 0,0375) + (40\% \times \frac{34,5}{100})$$

$$IKP1=0,3698$$

Dari perhitungan didapat nilai Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek adalah sebesar 0,3698. Hasil capaian dari IKP1 mencapai 114,37% dari target tahun 2021 yaitu sebesar 0,3233.

Meski begitu, kondisi pandemi masih menurunkan popularitas angkutan umum. Okupansi angkutan umum untuk rute yang sudah terlayani masih belum normal. Bahkan berdasarkan kondisi di lapangan, beberapa layanan yang sudah memiliki izin masih belum beroperasi 100% dan beberapa trayek angkutan juga berhenti beroperasi. Selain itu masyarakat beralih dari moda angkutan umum ke moda angkutan taksi online dan ojek online.

Sementara itu, capaian IKK3 persentase simpul transportasi utama yang terintegrasi mencapai 127,78% dari target karena penentuan target berdasarkan data pada perencanaan pengembangan transportasi dari BPTJ. Sementara pada praktik di lapangan, integrasi simpul juga mendapat intervensi dari Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang juga melakukan penataan simpul sehingga realisasi capaian melebihi target yang ditentukan.

## 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek

Parameter umum yang saat ini digunakan oleh seluruh institusi pemerintah sebagaimana memang diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Adapun kegunaan dari survei indeks kepuasan masyarakat ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja masing masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik.

Nilai Interval Konveksi IKM 25,00-64,99 artinya kinerja unit pelayanan Tidak Baik; Nilai Interval Konveksi IKM 65,00-76,60 artinya kinerja unit pelayanan Kurang Baik; Nilai Interval Konveksi IKM 76,61-88,30 artinya kinerja unit pelayanan Baik; Nilai Interval Konveksi IKM 88,31-100,00 artinya kinerja unit pelayanan Sangat Baik. Terdapat 9 (sembilan) unsur pelayanan dalam survei

kepuasan masyarakat di mana terdapat atribut pertanyaan untuk mewakili unsur-unsur tersebut. Atribut pertanyaan tentunya disesuaikan dengan keluaran dari masing-masing institusi. Keluaran dari survei IKM yang dilakukan dalam studi ini adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat dalam jasa pelayanan angkutan umum di Jabodetabek yang akan diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 2.2. Unsur Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat**

No	Unsur Pelayanan	Atribut Pertanyaan
1	<b>Persyaratan</b>	Apakah Terdapat Informasi tentang Rute Trayek Pelayanan Angkutan JA Connection, JR Connection, dan Transjabodetabek pada Terminal maupun Halte/Shelter?
2	<b>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</b>	Apakah proses menaikan dan menurunkan penumpang pada angkutan JA Connection, JR Connection, dan Transjabodetabek selalu pada halte/shelter/tempat pemberhentian yang telah ditentukan?
3	<b>Waktu Penyelesaian</b>	Bagaimana pendapat Anda mengenai ketepatan waktu pelayanan angkutan JA Connection, JR Connection, dan Transjabodetabek? Berapa Lama Waktu Tunggu yang Anda Butuhkan untuk Memperoleh Pelayanan Angkutan JA Connection, JR Connection, dan Transjabodetabek?
4	<b>Biaya/Tarif</b>	Apakah Tarif Pelayanan Angkutan JA Connection, JR Connection, dan Transjabodetabek Saat ini Sudah Sesuai dengan Kualitas Pelayanan yang Diberikan Apakah ada tarif tambahan diluar tarif resmi dalam pelayanan angkutan JA Connection, JR Connection, dan Transjabodetabek?
5	<b>Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</b>	Apakah terdapat informasi jadwal kedatangan angkutan? Apakah waktu kedatangan dan keberangkatan angkutan sesuai dengan jadwal yang ada?
6	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Bagaimana pendapat Anda tentang kompetensi petugas (sopir dan kernet) angkutan JA Connection, JR Connection, dan Transjabodetabek?
7	<b>Perilaku Pelaksana</b>	Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan di angkutan JA Connection, JR Connection, dan Transjabodetabek?
8	<b>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</b>	Bagaimana ketersediaan fasilitas pengaduan pelanggan di angkutan JA Connection, JR Connection, dan Transjabodetabek? Bagaimana respon petugas angkutan JA Connection, JR Connection, dan Transjabodetabek dalam menerima pengaduan

		dari pelanggan?
9	Sarana dan Prasarana	Bagaimana kualitas sarana (kendaraan) angkutan JAConnection, JR Connection, dan Transjabodetabek?
		Bagaimana kualitas prasarana (halt/shelter/tempat henti) angkutan JA Connection, JR Connection, dan Transjabodetabek?
		Bagaimana fasilitas integrasi moda/perpindahan angkutan yang ada pada angkutan JA Connection, JR Connection, dan Transjabodetabek?

Terdapat 9 (sembilan) unsur pelayanan dan 15 (lima belas) atribut pertanyaan guna mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum di wilayah Jabodetabek. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data maka di peroleh nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut.

**Tabel 2.3. Penilaian Unsur Pelayanan**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	Bobot Nilai Rata-rata Terrimbang	Nilai Indeks Unit Pelayanan
1	Persyaratan	3,03	0,11	0,33
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,35	0,11	0,37
3	Waktu Penyelesaian	2,75	0,11	0,30
4	Biaya/Tarif	3,27	0,11	0,36
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	2,97	0,11	0,33
6	Kompetensi Pelaksana	3,17	0,11	0,35
7	Perilaku Pelaksana	3,12	0,11	0,34
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,15	0,11	0,35
9	Sarana dan Prasarana	3,09	0,11	0,34
<b>Nilai Indeks Unit Pelayanan</b>				<b>3,07</b>

Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Nilai IKM setelah dikonversi (Nilai Indeks x Nilai Dasar) adalah  $3,07 \times 25 = 76,73$
- Berdasarkan hasil nilai konversi diatas sebesar "76,73," maka mutu pelayanan yang didapat adalah bernilai "B"
- Sehingga berdasarkan mutu pelayanan diatas, maka kinerja unit pelayanan dapat di kategorikan "Baik."

Ketepatan waktu dan waktu tunggu merupakan unsur pelayanan yang memperoleh indeks rendah dalam persepsi masyarakat, hal ini bisa di sebabkan jumlah permintaan angkutan yang menurun berkaitan dengan penurunan mobilitas masyarakat di tengah situasi pandemi di mana terdapat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat.

Penurunan jumlah permintaan berdampak pada, meningkatnya lama waktu

berhenti angkutan di titik awal dan akhir guna menunggu penumpang, sehingga *headway*/jarak waktu pelayanan menjadi lebih lama dan waktu tunggu pelayanan menjadi lebih lama.

Data kelemahan pelayanan tersebut dapat menjadi dasar bagi BPTJ untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum perkotaan agar masyarakat dapat mendapat pelayanan angkutan umum yang ideal dan dapat menarik minat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum.

### 3. On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek

OTP menunjukkan rasio antara jumlah keberangkatan dan kedatangan angkutan umum yang tepat waktu dengan jumlah total keberangkatan dan kedatangan angkutan umum. Data diperoleh dengan melakukan perekapan atas kedatangan dan keberangkatan di terminal dan stasiun.

Penghitungan OTP dilaksanakan terhadap angkutan umum bus perkotaan yang perizinannya dikeluarkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dan angkutan kereta komuter Jabodetabek. Data OTP pada masing-masing moda transportasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4. On Time Performance Bus Perkotaan**

No	Jenis Pelayanan	On Time Performance (%)	
		Berangkat	Datang
1	Transjabodetabek	72	56
2	JA Connexion	60	30
3	JR Connexion	50	50

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, diperoleh nilai IKK8 Persentase Perjalanan Angkutan Umum dari Terminal Tipe A yang Tepat Waktu sebesar 53%.

$$\frac{72 + 56 + 60 + 30 + 50 + 50}{6} = 53$$

**Tabel 2.5. On Time Performance Kereta Api Perkotaan**

Bulan	KRL Tepat Waktu	KRL Terlambat	Total Perjalanan KRL / Bulan	Persentase Ketepatan Waktu
Januari	29.144	595	29.739	98%
Februari	25.691	1.640	27.331	94%
Maret	28.570	1.824	30.394	94%
April	27.351	2.059	29.410	93%

Mei	27.360	2.059	29.419	93%
Juni	27.368	2.380	29.748	92%
Juli	27.486	1.145	28.631	96%
Agustus	28.269	2.099	30.368	93%
September	27.110	2.297	29.407	92%
Oktober	27.373	3.209	30.582	<b>90%</b>
November	25.743	4.022	29.754	<b>86%</b>
Desember	24.188	6.822	31.010	<b>78%</b>
<b>Rata-Rata</b>				<b>91,6%</b>

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, diperoleh nilai IKK9 Persentase Perjalanan Kereta Api Perkotaan yang Tepat Waktu sebesar 91,6%

Berdasarkan manual penghitungan indikator kinerja utama, IKP2.2 On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 IKP2.2 &= (50\% \times IKK8) + (50\% \times IKK9) \\
 IKP2.2 &= (50\% \times 53) + (50\% \times 91,6) \\
 IKP2.2 &= 72,3
 \end{aligned}$$

Nilai akhir On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek adalah 72,3% sedangkan target OTP pada tahun 2021 adalah 80,5% sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 89,81%.

Dijelaskan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebelumnya bahwa ketepatan waktu dan waktu tunggu merupakan unsur pelayanan yang memperoleh indeks paling rendah dalam persepsi masyarakat. Hal ini bisa di sebabkan oleh jumlah permintaan angkutan yang menurun berkaitan dengan penurunan mobilitas masyarakat di tengah situasi pandemi di mana terdapat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat.

Penurunan jumlah permintaan berdampak pada, meningkatnya lama waktu berhenti angkutan di titik awal dan akhir guna menunggu penumpang, sehingga headway/jarak waktu pelayanan menjadi lebih lama dan waktu tunggu pelayanan menjadi lebih lama.

#### 4. **Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan**

Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi Jabodetabek diwujudkan dengan persentase perjalanan angkutan umum yang bebas kecelakaan lalu lintas dalam 10.000 keberangkatan. Persentase ini membandingkan jumlah kecelakaan yang melibatkan angkutan bus perkotaan

dengan jumlah total perjalanan bus perkotaan di wilayah Jabodetabek. Data kecelakaan bus perkotaan diperoleh atas hasil koordinasi dengan perusahaan otobus (Transjabodetabek, JRC, dan JAC) sebagai operator bus perkotaan.

**Tabel 2.6. Kejadian Kecelakaan Tahun 2021**

No	Operator	Jumlah Trip/Tahun	Jumlah Kejadian Kecelakaan
1.	Transjabodetabek	30.516	8
2.	Jabodetabek Residence Connexion (JRC)	13.736	2
3.	Jabodetabek Airport Connexion (JAC)	130.845	15
	Total	175.097	25

Berdasarkan manual penghitungan indikator kinerja utama, IKP3 persentase perjalanan angkutan umum yang bebas kecelakaan lalu lintas dalam 10.000 keberangkatan dihitung menggunakan rumus:

$$IKP3 = 100\% - \left( \frac{\sum \text{Kecelakaan Bus Perkotaan Jabodetabek}}{\sum \text{Trip Bus Perkotaan Jabodetabek} / 10.000} \right)$$

$$IKP3 = 100\% - \left( \frac{25}{175.097 / 10.000} \right)$$

$$IKP3 = 98,57\%$$

Hasil penghitungan menunjukkan persentase perjalanan angkutan umum yang bebas kecelakaan lalu lintas dalam 10.000 keberangkatan adalah sejumlah 98,57%. Nilai ini mencapai 101,62% dari target yang ditentukan untuk tahun 2021 yaitu 97.

#### 5. Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi birokrasi di seluruh kementerian/Lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda). Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dilaksanakan berdasarkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010 – 2025. *Grand Design* menjadi acuan bagi K/L/Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Selain itu, tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi dan menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan public oleh pejabat di instansi pemerintah;

2. Menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
5. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; dan
6. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Tingkat reformasi birokrasi sebuah unit pemerintah diukur dengan indeks reformasi birokrasi yang didapatkan dari hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

PMPRB memberikan penilaian terhadap 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari:

1. Manajemen perubahan
2. Deregulasi kebijakan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Penataan tatalaksana
5. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia
6. Penguatan akuntabilitas
7. Penguatan pengawasan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Hasil dari PMPRB di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7. Lembar Kerja PMPRB**

No	Penilaian	Skor
I	Pemenuhan	<b>14,02</b>
1	Manajemen perubahan	2,00
2	Deregulasi kebijakan	1,00
3	Penataan dan penguatan organisasi	2,00
4	Penataan tatalaksana	0,95
5	Penataan sistem manajemen SDM	1,26

No	Penilaian	Skor
6	Penguatan akuntabilitas	2,50
7	Penguatan pengawasan	1,89
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	2,41
<b>II</b>	<b>Reform</b>	<b>18,86</b>
1	Manajemen perubahan	3,00
2	Deregulasi kebijakan	2,00
3	Penataan dan penguatan organisasi	1,50
4	Penataan tatalaksana	3,42
5	Penataan sistem manajemen SDM	1,75
6	Penguatan akuntabilitas	1,50
7	Penguatan pengawasan	1,95
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	3,75
<b>Nilai Akhir</b>		<b>32,88</b>

Berdasarkan tabel penilaian PMPRB di atas, diketahui bahwa nilai Indeks RB Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2021 adalah sebesar 32,88



## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Alokasi Anggaran Tahun 2021

Pagu awal DIPA BPTJ tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.350.587.093.000. Namun sampai dengan bulan Desember 2021, BPTJ telah mengalami 14 kali revisi DIPA:

1. Revisi 1 pada 14 Januari 2021
2. Revisi 2 pada 19 Februari 2021
3. Revisi 3 pada 17 April 2021
4. Revisi 4 pada 24 April 2021
5. Revisi 5 pada 2 Juni 2021
6. Revisi 6 pada 4 Juli 2021
7. Revisi 7 pada 26 Juli 2021
8. Revisi 8 pada 4 Agustus 2021
9. Revisi 9 pada 9 September 2021
10. Revisi 10 pada 13 Oktober 2021
11. Revisi 11 pada 25 Oktober 2021
12. Revisi 12 pada 25 November 2021
13. Revisi 13 pada 30 November 2021
14. Revisi 14 pada 17 Desember 2022

Perbandingan antara Pagu awal dengan DIPA revisi terbaru dan realisasi anggarannya dijabarkan dalam tabel berikut:

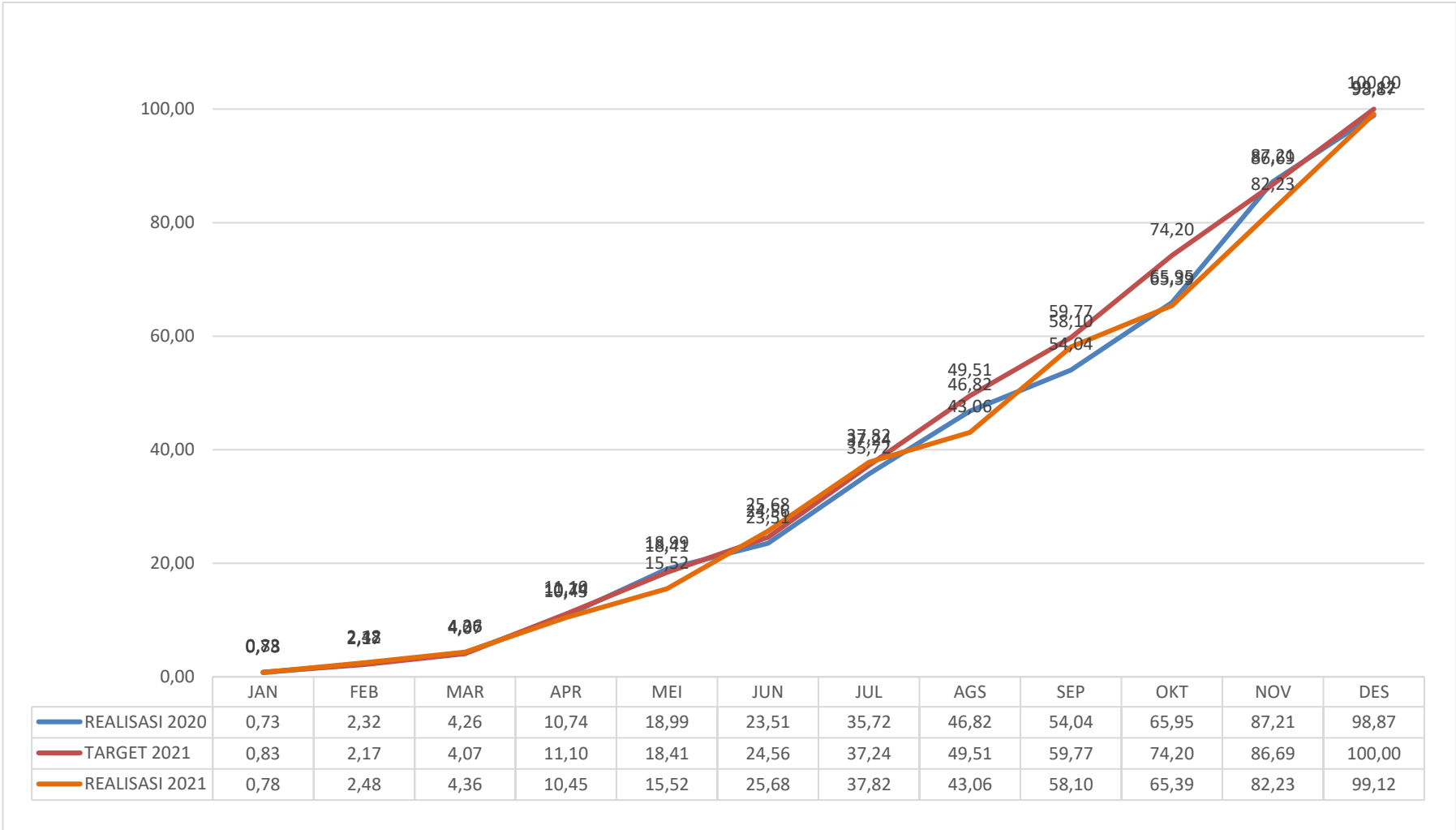
**Tabel 2.8. Anggaran per Jenis Belanja Triwulan IV**

Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Akhir Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	%
Belanja Pegawai	25.189.700.000	23.406.154.000	23.163.244.111	98,96%
Belanja Barang	124.176.848.000	105.026.415.000	103.363.359.816	98,42%
Belanja Modal	201.220.545.000	165.324.777.000	164.656.928.890	99,60%
Total	350.587.093.000	293.757.346.000	291.183.532.817	99,12%

DIPA awal BPTJ pada awal tahun 2021 yang semula sejumlah Rp.350.587.093.000 telah mengalami empat belas kali revisi sehingga DIPA BPTJ per akhir Desember 2021 adalah sejumlah Rp.293.757.346.000 dengan selisih pengurangan sebesar Rp.56.829.747.000. Revisi DIPA tersebut dilakukan atas dasar *refocusing* anggaran Kementerian/Lembaga sehingga BPTJ juga perlu melakukan penyesuaian untuk menyusun anggaran sesuai dengan alokasi yang tersedia.

## **2. Realisasi Anggaran Tahun 2021**

Anggaran BPTJ sampai dengan bulan Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp.291.183.532.817,00 atau 99,12% terhadap pagu total. Kurva S perbandingan target, realisasi, dan realisasi tahun sebelumnya disajikan sebagai berikut.



**Gambar 2.1. Kurva S Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan BPTJ Triwulan IV Tahun 2021**

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran per Indikator Kinerja Program (IKP) diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.9. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKP Triwulan I s.d Triwulan III Tahun 2021**

Indikator Kinerja Program	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
IKP1. Meningkatnya Modal Share Angkutan Umum Perkotaan di Wilayah Jabodetabek	2.731.700.000	-	-	2.731.700.000	1.345.438.050	49,25	2.510.474.000	2.509.822.150	99,97
IKP2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	110.818.286.000	1.272.095.937	1,15	108.655.864.000	8.740.807.595	8,04	99.390.719.000	43.343.768.352	43,61
IKP2.2. <i>On Time Performance</i> (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	21.293.944.000	477.001.100	2,24	20.971.009.000	1.051.674.450	5,01	19.966.864.000	12.667.989.815	63,45
IKP3. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Trip	24.034.788.000	-	-	24.034.788.000	4.439.290.265	18,47	24.034.788.000	20.284.959.163	84,40
IKP4. Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	83.885.853.000	391.691.105	0,47	79.521.210.000	6.656.343.777	8,37	63.287.187.000	34.580.787.315	54,64
IKP5. Nilai AKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	86.164.007.000	12.214.356.342	14,18	91.064.396.000	18.346.140.836	20,15	84.567.314.000	57.279.666.156	67,73

**Tabel 2.10. Capaian Kinerja Anggaran Berdasarkan IKP Triwulan IV Tahun 2021**

Indikator Kinerja Program	Triwulan IV		
	Anggaran	Realisasi	%
IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	39.992.656.000	39.904.582.081	99,78%
IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	131.925.941.000	130.956.671.828	99,27%
IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	8.168.136.000	8.052.850.040	98,59%
IKP3 Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan	29.103.299.000	29.053.307.253	99,83%
IKP4 Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ	84.567.314.000	83.216.121.615	98,40%

Capaian Kinerja Anggaran BPTJ pada Triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 41,02% dari progres capaian triwulan ke III. Kenaikan ini ditunjukkan dengan realisasi Triwulan IV yang mencapai 99,12% dibandingkan dengan realisasi pada triwulan III yang sebesar 58,10%.

### 3. Efisiensi Anggaran Tahun 2021

Penghitungan efisiensi anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Pengukuran efisiensi Output Program tingkat unit eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$EOP = \frac{\sum_{i=1}^n [(AA Program_i \times COP_i) - RA Program_i]}{\sum_{i=1}^n AA Program_i} \times 100\%$$

Keterangan:

EOP : Efisiensi Output Program  
AA Program : Alokasi Anggaran  
RA Program : Realisasi Anggaran  
COP : Capaian Output Program  
n : Jumlah Output Program

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi Pada Triwulan IV tahun 2021, didapatkan adanya efisiensi anggaran sebesar 3,74%. Efisiensi anggaran per Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut

**Tabel 2.11. Efisiensi Anggaran Triwulan IV Tahun 2021**

Indikator Kinerja Program	Capaian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	AA x COP	(AA X COP) - RA	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(2)	(6)=(5)-(4)	(7)=(6)÷(3)
IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	114%	39.992.656.000	39.904.582.081	45.739.600.667	5.835.018.586	14,59%
IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	102,30%	131.925.941.000	130.956.671.828	134.960.237.643	4.003.565.815	3,03%
IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	89,31%	8.168.136.000	8.052.850.040	7.335.802.942	-717.047.098	-8,78%
IKP3 Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan	101,60%	29.103.299.000	29.053.307.253	29.568.951.784	515.644.531	1,77%
IKP4 Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ	100%	84.567.314.000	83.216.121.615	84.567.314.000	1.351.192.385	1,60%
Total		293.757.346.003	291.183.532.821	302.171.907.041	10.988.374.225	3,74%

## BAB III PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2021, terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang telah dihitung capaian pelaksanaannya.
2. Adapun rincian capaian masing-masing IKP pada Triwulan IV adalah
  - a. IKP1. Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek terealisasi sebesar 0,3698 (target 0,3233);
  - b. IKP2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek terealisasi sebesar 76,73 (target 75);
  - c. IKP2.2. On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek terealisasi sebesar 72,3 (target 73);
  - d. IKP3. Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan terealisasi sebesar 98,57% (target 98);
  - e. IKP5. Indeks Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terealisasi sebesar 32,88 (target 32,88).
3. Realisasi anggaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada Triwulan IV tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 41,02% dari triwulan sebelumnya
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja tahun selanjutnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek